

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial.¹ Gerakan sosial juga bisa dilihat sebagai upaya bersama massa rakyat yang hendak melakukan pembaruan atas situasi dan kondisi sosial politik yang dipandang tidak berubah dari waktu ke waktu atau juga untuk menghentikan kondisi *status quo*.²

Gerakan sosial muncul dalam segala bentuk dan ukuran.³ Ada yang memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial; ada yang pada perubahan individual. Gerakan perubahan struktural ada dua bentuk: (a) Gerakan sosial politik (Tilly menyebutnya gerakan sosial nasional) yang berupaya mengubah stratifikasi politik, ekonomi, dan kelas.⁴ (b) Gerakan sosio-kultural yang ditujukan pada aspek yang kurang teraba dari kehidupan sosial, mengusulkan perubahan

¹ Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 216.

² *Ibid.*

³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 313.

⁴ *Ibid.*, hlm. 314.

keyakinan, nilai, simbol, dan pola hidup sehari-hari. Contohnya gerakan *hippies* dan *punk*.⁵

Gerakan ini lebih menargetkan individu ketimbang struktur juga mempunyai dua bentuk: (a) Gerakan suci, mistik, religius yang berjuang untuk mengubah atau menyelamatkan anggotanya dan menghidupkan kembali semangat keagamaan. Contohnya, gerakan revivalis di Abad Pertengahan; gerakan Islam Fundamentalis; gerakan penyebar Injil yang diprakarsai Paus John Paul II: (b) Gerakan sekuler yang berupaya memperbaiki mental atau moral anggotanya.⁶

Gerakan religius dapat dirumuskan sebagai gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang *gaib* (supranatural), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.⁷ Munculnya kelompok-kelompok keagamaan tersebut diprakarsai oleh orang-orang yang memiliki kharisma sehingga dengan kharisma tersebut orang mengikuti ajarannya.⁸

Dalam agama Islam di Indonesia, fenomena tersebut terlihat pada sejumlah kelompok keagamaan, misalnya: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Salafi, Jama'ah Tabligh; Kelompok Tarekat seperti Tarekat Khalwatiyyah, Tarekat Qadiriyyah, Tarekat Naqsyabandiyyah, Tarekat Rifa'iyyah, Tarekat Sanusiyyah dan sebagainya; Ahmadiyyah, Islam Jama'ah, Inkar As-sunnah sebagai gerakan

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hlm. 315.

⁷ Elly M. Setiadi, *Op.Cit*, hlm. 219.

⁸ Syamsu A. Kamarudin, *Jama'ah Tabligh Sejarah, Karakteristik, Dan Pola Perilaku Dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Gaung Persada (Gp) Press, 2010), hlm. 6.

sempalan. Juga sejumlah aliran kebatinan baik yang merupakan warisan leluhur maupun perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal (akulturasi).⁹

Dalam Islam kelompok tersebut memiliki misi untuk membawa kembali orang Islam pada ajaran sucinya yaitu syari'ah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam pandangan Mulhan penerapan syari'ah (Al-Qur'an dan Sunnah) secara ketat dalam seluruh aspek kehidupan dikategorikan sebagai fundamentalis.¹⁰

Di antara kelompok keagamaan yang banyak diminati dan menarik perhatian semua kalangan khususnya umat muslim sekarang ini adalah Jama'ah Tabligh.¹¹ Kelompok ini memiliki keunikan tersendiri dalam mensosialisasikan pemahamannya yang tidak sama dengan kelompok keagamaan yang umum. Dalam mensosialisasikan ajaran Islam sebagai misinya, Jama'ah Tabligh berupaya menampilkan perilaku dan menggunakan metode yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan Sahabatnya.¹²

Jama'ah Tabligh muncul pertama kali di New Delhi India pada periode ketiga abad ke-13 H yang didirikan oleh Maulana Syaikh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawy. Nadwi mengemukakan saat itu kemunculannya diakibatkan oleh situasi sosial umat Islam di sebagian besar wilayah sangat jauh dari pelaksanaan ajaran agamanya.¹³ Dalam Jamaah ini dikenal enam prinsip (doktrin) yang menjadi asas dakwahnya, yaitu: kalimah

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid*, hlm. 7.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid*, hlm. 8.

¹³*Ibid*, hlm. 58.

agung (syahadat), menegakkan shalat, ilmu dan dzikir, memuliakan setiap Muslim, ikhlas, berjuang *fisabilillah* (keluar di jalan Allah). Metode dakwah jamaah ini berpijak kepada tabligh (menyampaikan) dalam bentuk *targhib* (memberi kabar gembira) dan *tarhib* (mengancam).¹⁴

JT masuk Indonesia pada tahun 1952, namun baru tahun 1974 menunjukkan geliatnya secara intensif dengan pusat dakwahnya di Masjid Kebun Jeruk Jakarta Barat. Sampai saat ini aktivitas di Masjid tersebut masih terus berjalan, dan menjadi pusat koordinasi kegiatan dakwah semua anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut Yusran Razak, walaupun penyebarannya di Indonesia bisa dilacak hingga tahun 1952, Ijtima JT yang pertama diselenggarakan di Medan pada tahun 1980. Dengan asumsi tersebut Yusran mempertegas bahwa masuknya JT dimulai dari Medan, Sumatera Utara. Ijtima tersebut dihadiri kurang lebih 1000 anggota. Pada tahun berikutnya ijtima dilaksanakan di Masjid Kebun Jeruk dengan 10.000 anggota. Pada tahun 1982 ijtima dilaksanakan di Lampung, tahun berikutnya di Kebun Jeruk lagi, dan pada 1984 dilaksanakan di Ancol Jakarta.¹⁵

Sedangkan JT masuk Kota Jambi pada tahun 1988 yang dipelopori oleh Ustad Sobri, Ustad Suardi, Ustad Kukuh, Abu Mahmud. Sedang Ustad Nasir di daerah Kabupaten Sarolangun. JT masuk Jambi diantaranya melalui Malaysia

¹⁴Ahmad Syafi'i Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 149.

¹⁵Amin, Edi, "*Dakwah Rahmatan Li Al-'Alamīn Jamaah Tabligh Di Kota Jambi*", Program Doktor Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2012, hlm. 37-38.

seperti yang dibawa oleh Ustad Nasir. Pada Tahun 1997 Masjid Raya pasar Angso Duo dijadikan markas provinsi, kemudian sempat berpindah markas ke beberapa tempat, dan saat ini markas provinsi Jambi di Masjid Al-Azhar Kec. Jelutung Kota Jambi. JT di kota Jambi mengalami tekanan dari *stake holder* kurun waktu 1988-1989. Selebaran dan pamlet tersebar dalam rangka pelarangan gerakan JT di kota Jambi dan sekitarnya. Saat itu JT masih beranggotakan puluhan orang, baru setelah tahun 1990-an gerakan JT mulai menunjukkan geliatnya.¹⁶ Diketahui sejak tahun 2017, JT di kota Jambi mengalami dualisme yang diakibatkan perbedaan pandangan mengenai sistem kepemimpinan sehingga di Kota Jambi terdapat satu markas lagi yang berada di Masjid Al-Jihad, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.¹⁷ Total dari dua kelompok tersebut saat ini anggota JT di Jambi mencapai sekitar 3700 orang lebih.¹⁸

JT di Kota Jambi atau Indonesia memiliki inti ajaran yang sama dengan JT yang ada di daerah lain maupun negara lain. Mereka hanya berbeda dalam fiqih dan beberapa peraturan dalam berdakwah yang mereka sebut sebagai *ushul-ushul da'wah* yang dibuat berdasarkan suatu tempat tersebut agar dapat menyesuaikan dakwah JT. Dalam mazhab dan fiqih, JT di Jambi mengikuti masyarakat secara umum yang menggunakan mazhab Syafi'i, sedangkan JT di India menggunakan mazhab Hanafi, dan begitu pula JT di Saudi Arabia menggunakan mazhab Hanbali. Hal ini dikarenakan JT tidak menyentuh persoalan *khilafiyah* (perbedaan

¹⁶*Ibid*, hlm 39.

¹⁷ Wawancara Bersama Ustad Ahmad Husaini Dan Jamaah Tabligh Asal Pakistan Berjumlah Enam Orang.

¹⁸ Wawancara Bersama Asmuni Lizar dan Sampit, 10 dan 11 Juni 2020 Melalui Telepon.

pendapat antar ulama) dan menyerahkan kepada anggotanya masing-masing dalam urusan *masa'il*. (hukum-hukum Islam).¹⁹

Dalam peraturan berdakwah, JT di Jambi dan Indonesia juga memiliki penambahan satu aturan yaitu larangan membicarakan politik praktis dalam dan luar negeri. Peraturan ini langsung diberikan oleh markas pusat JT yang berada di Delhi, India, sehingga peraturan di setiap negara memiliki jumlah yang berbeda. Untuk JT Indonesia sendiri berjumlah 28 yang dirangkum menjadi per-empat hal sebagai berikut:²⁰

1. Empat perkara yang diperbanyak: *da'wah Ilallah* (mengajak manusia pada Allah), *ta'lim wa ta'lum* (belajar mengajar), dzikir ibadah, *khidmat* (melayani sesama).
2. Empat perkara yang dikurangi: masa makan dan minum, masa tidur dan istirahat, keluar masjid, bicara sia-sia.
3. Empat perkara yang harus dijaga: jaga ketaatan pada *amir* (pemimpin) jaga amalan *ijtimai* (berjamaah), jaga kehormatan masjid, jaga sifat sabar dan tahan uji.
4. Empat perkara yang ditinggalkan: mengharap makhluk, meminta pada makhluk, memakai barang orang lain tanpa izin, sifat boros dan mubazir.

¹⁹ Wawancara Bersama Ustad Ahmad Husaini Dan Jamaah Tabligh Asal Pakistan Berjumlah Enam Orang

²⁰ Kombespol (Purn) Drs.H. John Hendri, S.H., M.H., *Tausiyah Jamaah Tabligh*, (Jakarta: Tim Mesjid Jami Kebon Jeruk Dan Masjid Al-Mutaqien, 2008), hlm. 6-7.

5. Empat perkara yang dijauhi: merendahkan, mengkritik, membandingkan, tidak menerima dan menolak secara langsung.
6. Empat perkara yang didekati: ahli dakwah, ahli Ilmu, ahli dzikir, pengarang kitab.
7. Empat perkara yang tidak boleh disentuh: *khilafiyah*, aib masyarakat, strata sosial, dan politik praktis dalam dan luar negeri.

Menurut keterangan narasumber, peraturan tambahan khusus tentang tidak boleh menyentuh ranah politik praktis dikarenakan politik dapat memecah belah masyarakat, bahkan umat Islam itu sendiri. Ia beralasan umat Islam tidak bisa disatukan dengan politik melainkan dengan amal-amal ruhani seperti solat, zakat, haji, puasa, dan lainnya. Ia memberikan contoh mengenai banyaknya partai Islam yang ada di Indonesia dengan kepentingan dan tujuannya masing-masing.²¹

Diantara hasil penelitian yang pernah ada mengatakan bahwa sudah menjadi ciri khas bagi Jamaah Tabligh dalam berdakwah, dimana mereka murni menjalankan misi dakwah *amar makruf nahi munkar*. Mereka tidak mau terlibat bahkan anti terhadap dunia politik. Gerakan Jamaah Tabligh adalah gerakan yang tidak mau bersinggungan dengan masalah politik.²² Dalam dakwahnya di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Jamaah Tabligh juga menanamkan ideologi keagamaan, yaitu melarang anggotanya untuk membicarakan *khilafiyah* dan

²¹ Wawancara Bersama Ustad Ahmad Husaini Dan Jamaah Tabligh Asal Pakistan Berjumlah Enam Orang.

²² Candra, Zamzami, Dan Dedy Sukma Indra, "Pandangan Jamaah Tabligh Terhadap Politik: Studi Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang", Universitas Andalas Padang, JISPO Vol 9 No. 02, Nomor 01, Juli-Desember 2019, hlm. 191.

politik disaat melakukan *khuruj* dan menganjurkan meninggalkan pembicaraan *khilafiyah* dan politik disaat kembali kerumah masing-masing.²³

Namun dalam perjalanannya Jamaah Tabligh mengalami pemahaman ideologi yang beragam, dimana ada yang tetap bertahan untuk meninggalkan pembicaraan politik dan *khilafiyah* sehingga cenderung apatis. Sebagian lagi tetap masih menganggap kegiatan politik seperti pemilu sebagai kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga ada diantara informan yang mengaku pernah aktif ikut berkampanye dan ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilu.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 200.

²⁴*Ibid*, hlm. 201.

Berikut tabel hasil penelitian di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang:

Tabel 1.1 Pemahaman JT di Kecamatan Nanggalo Terhadap Politik/Pemilu.²⁵

No	Pengelompokkan	Jumlah (Orang)
1	Pembahasan politik/pemilu oleh jamaah	
	Tidak pernah	10
	Pernah	5
	Sering	0
2	Arahan jamaah untuk aktifberpolitik/pemilu	
	Ada	2
	Tidak ada	13
3	Informasi tentang pemilu dari non jamaah	
	Dari penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu)	8
	Dari media cetak/elektronik	7
	Dari lainnya	0
4	Larangan membahas politik/pemilu oleh jamaah	
	Ada	4
	Tidak ada	11
5	Jamaah yang terdaftar dalam DPT (Daftar pemilih)	
	Ada	11
	Tidak ada	4
6	Keikutsertaan dalam kampanye	
	Ada	3
	Tidak ada	12
7	Memberikan hak suara pada pemilu Gubernur	
	Ada	9
	Tidak ada	6
8	Orientasi ikut memilih	
	Keinginan sendiri	12
	Ajakan kawan	0
	Arahan jamaah	1
	Karena uang	0
	Lainnya	2

²⁵*Ibid*, hlm. 196.

Dari data tabel hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Informan yang merupakan Jamaah Tabligh di Kecamatan (*halaqah*) Nanggalo memiliki keberagaman dalam pemahaman politik dan pemilu. Disamping itu mereka juga berbeda dalam memahami informasi yang diterima dari jamaahnya dibuktikan dengan terjadinya perbedaan dalam keikutsertaannya dalam politik dan keterlibatan serta partisipasinya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.²⁶

Dalam penelitian lainnya di Kota Jambi, Menurut Maulana Abdul Wahid, Dalam pandangan Jamaah Tabligh, ketentuan larangan berbicara mengenai politik merupakan bentuk perintah yang jelas untuk para jamaah. Dengan ketentuan ini tentunya para jamaah juga tidak akan ikut terlibat aktif dalam kegiatan politik termasuklah dalam partai politik Islam sekalipun. Namun dalam Jamaah Tabligh tidak ada ketentuan khusus untuk menolak sistem demokrasi. Menurut Maulana Abdul Wahid, para jamaah yang sudah terlibat aktif dalam kegiatan Jamaah Tabligh, kecil kemungkinan untuk terlibat dalam aktivitas politik langsung baik itu partai politik nasionalis maupun partai politik Islam.²⁷

Jamaah Tabligh memisahkan antara agama dan politik. Setiap anggota tidak berhak mengkaji politik atau terjun ke dalam urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Sebab menurut Jamaah Tabligh politik praktis hanya akan

²⁶*Ibid*, hlm. 196-197.

²⁷Mubarak, Haris Dan Abdul Razak, "*Pandangan Jamaah Tabligh Dan Salafi Terhadap Khilafah, Demokrasi Dan Monarki (Satu Tinjauan Jambi)*", Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 250.

membawa pada perpecahan.²⁸ Mereka mendoktrinkan kewajiban berdakwah keluar rumah (*khuruj*) tiga hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan selama hidup.²⁹ Di kota Jambi, dakwah JT sudah menunjukkan aktifitasnya dengan sistem *khuruj* tersebut. Maka untuk mengetahui aktifitas dakwah JT di kota Jambi perlu kajian yang mendalam.³⁰

Provinsi Jambi sejak dahulu adalah daerah yang memiliki akar sejarah Islam. Penduduk asli Provinsi Jambi adalah suku Melayu, yang kemudian bercampur dengan suku Minang dan Arab-Turki. Sebelum Indonesia merdeka, Provinsi Jambi merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam Melayu Jambi (1500-1901). Penyebaran Islam di daerah Jambi dimulai dari datangnya seorang ulama dari Turki (menurut referensi lainnya dari Gujarrat) yang bergelar Datuk Paduko Berhalo. Nilai-nilai Islam sejak dahulu menjadi nilai yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat Jambi. Hal ini terlihat dari falsafah yang hidup ditengah masyarakat yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.³¹ Adat yang Islami inilah yang kemudian menjadi motor penggerak tampilnya berbagai bentuk budaya Islam Melayu Jambi, sebagai hasil asimilasi budaya Arab dan adat Jambi.³²

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM) menegaskan bahwa adat Melayu Jambi merupakan

²⁸<https://www.nu.or.id/post/read/32537/jamaah-tabligh>. Akses 2 Agustus 2020.

²⁹Mubarak, *Loc.It.*

³⁰Amin, *Op.cit.*, hlm. 28-29.

³¹ Mohd. Arifullah, “*Hegemoni Islam dalam Evolusi Epistemologi Budaya Melayu Jambi*”, IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, Kontekstualita Vol. 30, No. 1, 2015, hlm. 132.

³²*Ibid.*

sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam seloko; “*Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lejang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi shara’, shara’ bersendi kitabullah, shara’ mengato, adat memakai*”. Sementara adat Melayu Jambi yang dimaksud memiliki makna yang luas, meliputi seluruh nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran.³³

Tampak jelas dari peraturan di atas bahwa adat Jambi yang menjadi penggerak kebudayaan Melayu Jambi dipengaruhi oleh sistem epistemologi Islam, dengan menempatkan *syara’* sebagai mahkota adat, inilah yang diungkap sebagai “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*”. Selain itu, Lembaga Adat Melayu yang bersistem *ico pakai adat* merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi, maka wajib bagi Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya memperkuat peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu.³⁴

Implementasi adat bersendi *syara’* dalam kebudayaan Melayu Jambi tampil dalam bentuk kebudayaan Jambi sekarang yang merupakan hasil akulturasi kebudayaan yang Islami dengan corak Melayu Kuno Budhis. Unsur-unsur kebudayaan Melayu Jambi disebutkan oleh Fachruddin Saudagar antara lain:

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

upacara kepercayaan tradisional, sistem kemasyarakatan/kepemimpinan, sistem gotong-royong, adat perkawinan, tata pendidikan, bahasa, seni, tata pergaulan, corak arsitektur bangunan, peralatan dan pertukangan.³⁵

Nuansa Islam dalam kesenian Melayu Jambi terasa dalam berbagai bentuk seni yang mengekspresikan kekentalan peradaban Islam, di antaranya *nasyid, kasidah, hadrah, barzanji, marhaban, zikir, nazam, syair, dendang, dadung, zapin*, dan lainnya. Berbagai bentuk seni tersebut awalnya diserap dari tamadun Islam di Timur Tengah, yang kemudian diolah menjadi khas Melayu Jambi. Beragam seni tersebut dalam kebudayaan Melayu difungsikan dalam berbagai aktivitas yang umumnya berhubungan dengan aktivitas Islami seperti upacara perkawinan, khitanan, festival, pesta budaya, hari besar agama Islam, dan lainnya.³⁶

Meneropong berbagai fakta di atas jelas tampak dalam pentas kebudayaan Melayu Jambi betapa Islam telah menjadi mainstream yang mempengaruhi corak pikir masyarakat Melayu Jambi, hingga adat Jambi menjadi tidak terpisahkan dari api Islam yang kemudian menggerakkan berbagai bentuk kreasi budaya yang juga bernuansa Islam.³⁷

Slogan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” mengandung nilai-nilai filosofis yang sangat kuat, yakni tentang teori kebenaran yang diakui oleh masyarakat Melayu Jambi. Keyakinan epistemologis yang dimiliki masyarakat Melayu Jambi sebagaimana yang tercermin dalam slogan tersebut

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

membuktikan bahwa masyarakat Jambi adalah masyarakat yang luwes dan moderat. Keluwesan dan moderasi ini muncul sebagai akibat logis pengakuan masyarakat Melayu Jambi akan eksistensi adat dan *syara'* yang sama-sama dinilai benar dan sejalan, sehingga saling mengisi. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang tokoh agama seperti Tarmizi bahwa slogan ini bermakna “bahwa perilaku masyarakat Jambi harus berlandaskan *syara'* atau hukum agama. Atau adat istiadat di Jambi selalu bersinergi dengan *syara'*, saling menopang dan memperkuat”.³⁸

Implikasi sosiologis dari pandangan dunia yang tercermin dari slogan itu adalah kehidupan sosial agama yang membumi, “*dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung.*” Lebih jauh, hukum Adat Jambi sebagaimana yang tercermin dalam slogan tersebut agaknya telah mendahului pandangan kebangsaan dan keislaman sebagaimana yang saat ini banyak dibicarakan dan didiskusikan menyangkut sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Slogan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” dengan sendirinya melahirkan sebuah pemikiran tentang Islam dan kebangsaan yang utuh, serta, melalui pemahaman akan slogan itu, dapat melahirkan sikap toleransi, terbuka, dan *tasamuh*.³⁹

Dengan demikian cita-cita di balik falsafah “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” adalah tatanan masyarakat yang harmonis dan ideal yang dipersatukan oleh nilai-nilai universal dan lokal. Terlebih bahwa masyarakat

³⁸ Bahrul Ulum, “*Politik Hukum Islam Melayu Jambi Adat Besendi Syarak, Syarak Besendi Kitabullah Dan Hubungannya dengan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam di Jambi*”, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2013, hlm. 222.

³⁹ *Ibid*, hlm. 223.

Jambi adalah masyarakat yang plural, konsep-konsep filosofik untuk menopang realitas sosio-kultural itu adalah sangat diperlukan agar sumber daya manusianya dapat memberikan potensi terbaiknya, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun agama.⁴⁰ Kendati demikian, eksistensi adat dan agama (Islam) di Jambi sebagaimana yang tercermin dalam slogan “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*” bukannya tidak menghadapi permasalahan sehingga dikhawatirkan identitas Jambi ini akan punah dan tinggal sejarah.⁴¹

Kaum konservatif menawarkan *al-ashalah*, otentisitas, dan orisinalitas yang, menurut mereka, hanya dapat diperoleh dengan kembali pada keaslian agama, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jargon yang diusung adalah kembali kepada dua sumber agama tersebut. Adapun metode dan langkah kerjanya adalah purifikasi, membersihkan segala macam pemikiran, perbuatan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai tidak punya dasar pada dua sumber yang asli itu.⁴²

Begitu juga dengan Jamaah Tabligh, disamping gerakan yang satu ini juga sudah bersifat Internasional, gerakan ini juga sering lebih cenderung tidak berbicara politik. Walaupun tidak berniat mengusung pendirian Negara Islam, tapi jika kehadiran Jamaah Tabligh yang selalu menanamkan ideologi yang anti politik

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid*, hlm. 228.

⁴²*Ibid.*

maka dikhawatirkan angka golput pun akan semakin meningkat.⁴³ Pada umumnya partisipasi yang rendah menunjukkan legitimasi yang rendah pula.⁴⁴

Eep Saefulloh Fatah telah mengklasifikasikan empat golongan golput yaitu: *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. *Keempat*, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.⁴⁵

Tren golput di Kota Jambi sendiri mengalami penurunan dan partisipasi masyarakatnya justru cenderung meningkat. Pada Pemilihan Walikota (Pilwako) Jambi tahun 2018 lalu, partisipasi pemilih mencapai angka 71 persen dari target semula 77 persen. Angka ini meningkat dari Pilwako sebelumnya dimana partisipasi pemilih hanya 62 persen meskipun tahun ini masih gagal memenuhi

⁴³Candra, Zamzami, *Op.Cit*, hlm. 191.

⁴⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm. 369.

⁴⁵Candra, Zamzami, *Op.Cit*, hlm. 193.

target.⁴⁶ Sementara itu sisanya sebanyak 29 persen tidak ikut berpartisipasi atau golput. Jika dipresentasikan, 71 persen dari jumlah DPT Kota Jambi sebanyak 384.2013 jiwa, ada sebanyak 272.784 jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Sementara sisanya sebanyak 111.418 atau 29 persen dari DPT warga Kota Jambi memilih golput.⁴⁷ Berdasarkan data resmi di laman KPU RI, jumlah pemilih Pilwako Jambi pada tahun 2018 lalu sebanyak 380.559 orang terdiri atas 181.312 laki-laki dan 187.567 pemilih perempuan.⁴⁸

Pada Pemilu serentak 17 April 2019 lalu, partisipasi pemilih di Kota Jambi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 340.971 pemilih dari total 11 kecamatan yang ada.⁴⁹ Sementara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg), secara rinci partisipasi pemilih di Kota Jambi yaitu untuk DPR RI sebanyak 299.475 pemilih, untuk DPRD Provinsi sebanyak 302.504 pemilih, untuk DPRD Kota Jambi sebanyak 316.658 pemilih dan untuk DPD RI sebanyak 285.162 pemilih.⁵⁰ Tidak diketahui dengan pasti faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Jambi masih ada yang memilih golput, apakah hal itu kemudian disebabkan masih adanya gerakan anti politik seperti JT yang sudah dipaparkan peneliti sebelumnya. Pada akhirnya, gerakan JT tersebut dapat membawa pengaruh terhadap budaya dan partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu unsur dalam keberlangsungan

⁴⁶ <https://jambi-independent.co.id/read/2018/06/30/24644//29-persen-warga-pilih-golput>. Akses 24 Maret 2020.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ <https://www.kpu.go.id/>. Akses 24 Maret.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

sistem politik, meskipun angka partisipasi pemilih di Kota Jambi mengalami tren peningkatan.

Salah satu contoh langsung terkait penelitian ini yang terjadi di Kota Jambi adalah mundurnya Jefri Hendrik dari kursi Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jambi tiga tahun lalu.⁵¹ Menjadi cukup penting dan menarik untuk dikaitkan dengan permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini karena Jefri Hendrik mengatakan sudah saatnya mengakhiri karir politiknya dikarenakan ingin fokus untuk berdakwah bersama JT.⁵²

Lelaki kelahiran dua Februari 1976 itu sudah malang melintang di dunia aktivis. Sejak aktivis mahasiswa hingga aktivis politik. Saat di aktivis mahasiswa, dirinya pernah menjadi Presiden BEM Unja dan Ketua HMI Cabang Jambi. Kemudian dia pernah juga sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Propinsi Jambi (2005-2007). Jabatan lainnya, yakni sebagai Bendahara Umum Pergerakan Indonesia (PI) Jambi 2002-2003. Kedekatannya dengan Zulkifli Nurdin (ZN) yang notabene ayah dari gubernur Zumi Zola sudah terbilang cukup lama. Ini terlihat dari jabatan yang pernah ia sandang sebagai Sekretaris Eksekutif ZN Center (2004-2005). Selain itu, juga pernah menjadi staf ahli Ratu Munawaroh istri Zulkifli Nurdin saat ibu Ratu menjabat sebagai anggota DPR RI.⁵³

⁵¹<https://metrojambi.com/read/2017/07/04/22095/zola-akui-jefri-hendrik-mundur/>. Akses 18 Februari 2020.

⁵² <https://www.jambiupdate.co/artikel-ini-alasan-jefri-hendrik-mundur-dari-kursi-sekjen-dpw-pan-jambi.html>. Akses 18 Februari 2020.

⁵³ <https://metrojambi.com/read/2017/07/04/22100/jefri-hendrik-ternyata-mantan-sekretaris-eksekutif-zn-center> . Akses 18 Februari 2020.

Menurut keterangannya di media, pasca mundur sebagai sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi, Jefri Hendrik mengatakan ingin memperdalam ilmu agama Islam di Temboro, Magetan, Jawa Timur⁵⁴ Dalam penelitian berjudul “Dampak Paham Keagamaan Jamaah Tabligh Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren Al Fatah Temboro” dijelaskan bahwa Pondok Pesantren Al Fatah Temboro adalah salah satu basis utama pendukung tersebarnya Jamaah Tabligh.⁵⁵ Pondok pesantren yang dulu berfaham Nahdiyyin ini saat ini berkembang begitu pesat dengan santri-santrinya mencapai lebih dari 10.000 dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dengan Berubahnya Al Fatah dari NU menjadi Jamaah Tabligh, tentu ada perubahan sistem pendidikannya.⁵⁶

Berdiri pada 1912, Al Fatah tercatat sebagai pondok pesantren tertua di Magetan. Pendirinya Kiai Siddiq, merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Magetan dan Rais ‘Aam pertamanya. Kiai Uzairon, penerusnya, setelah mempelajari amalan Tabligh ke Mesir dan India, memutuskan untuk meninggalkan NU.⁵⁷ Al Fatah juga melebarkan sayap dengan membuka cabang di

⁵⁴<https://metrojambi.com/read/2017/07/07/22115/pasca-mundur-jefri-mau-mondok-ke-jawa-timur>. Akses 18 Februari 2020.

⁵⁵ Muhammad Luthvi Al Hasyimi, “*Dampak Faham Keagamaan Jamaah Tabligh Terhadap Perubahan Sistem Pendidikan Di Pondok Pesantren Al Fatah Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*”, Institute Agama Islam Tribakti Kediri, Vol. 7, No. 1, Mei 2017, Hlm. 99.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 99.

⁵⁷https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/248555-meraksasa-karena-tablig-2. Akses 18 Februari 2020.

130 wilayah, dan 4 cabang di Malaysia, yakni di Selangor, Johor, Pahang dan Kuching.⁵⁸

Fenomena yang terjadi pada Jefri Hendrik tersebut bisa jadi memiliki hubungan dengan dinamika aktivitasnya dalam gerakan Jamaah Tabligh selama ini dan dapat menjadi gambaran bagi peneliti. Gerakan JT yang apolitis dapat menjadi penyebab masih adanya tindakan apolitis pada struktur masyarakat di Kota Jambi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendeskripsikannya lebih lanjut dengan mengangkat sebuah penelitian dengan judul: **“Gerakan Jamaah Tabligh (JT) dan Implikasinya Terhadap Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi Gerakan Jamaah Tabligh (JT) dan Implikasinya Terhadap Budaya Politik Masyarakat Kota Jambi, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana perkembangan JT di Kota Jambi?
2. Bagaimana implikasi gerakan JT terhadap budaya politik masyarakat di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah terdapat pertanyaan yang akan diidentifikasi, yang tujuannya adalah:

⁵⁸ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan JT di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi gerakan JT terhadap budaya politik masyarakat di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui bagaimana perkembangan gerakan Jamaah Tabligh (JT) dan implikasinya terhadap budaya politik masyarakat di Kota Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan para pembaca terhadap studi-studi mengenai pemikiran dan gerakan Islam yang ada di Kota Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Framing

Framing (bingkai) merupakan skema-skema untuk menafsirkan dan menyebarluaskan penafsiran-penafsiran gerakan dan dirancang guna dapat memobilisasi para anggota dan memperoleh dukungan dan kepercayaan.⁵⁹ Konsep *frame* dalam gerakan sosial mengambil inspirasi dari karya Goffman. Menurut Goffman, *frame* adalah “kerangka penafsiran yang memungkinkan orang untuk menempatkan, memahami, mengidentifikasi dan menamai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sekitar mereka maupun dunia secara

⁵⁹ Qintan Wiktorowicz, *Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial Dalam Gerakan Sosial Islam, Teori, Pendekatan Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Gading Publishing & Yayasan Wakaf Paramadina, 2012), hlm. 59.

keseluruhan”.⁶⁰ *Frame* berperan membantu orang menyarikan peristiwa dan kejadian menjadi pengalaman bermakna, kemudian mengorganisasi pengalaman tersebut dan memberi panduan untuk bertindak.⁶¹

Bertolak dari gagasan Goffman, Snow & Benford menawarkan konsep *framing* – proses penciptaan *frame* – untuk menjelaskan gerakan sosial atau aksi kolektif. Mereka berpendapat bahwa dalam gerakan sosial terjadi *framing*, atau lebih tepat gerakan sosial merupakan hasil suatu *framing* dan menghasilkan *frame* tertentu. Dalam gerakan sosial, *frame* diciptakan untuk memahami peristiwa dengan cara menyederhanakan dan menyarikan apa yang terjadi “dunia di luar sana” dan penyederhanaan ini “bertujuan untuk memobilisasi pengagum dan pengikut, menuai dukungan dari penonton, dan membuyarkan (*demobilized*) penentang”.⁶²

Dengan kata lain, *frame* aksi kolektif adalah, pertama, seperangkat keyakinan dan pemaknaan, yang berorientasi pada aksi dan yang menginspirasi serta melegitimasi aksi tersebut; kedua, kampanye yang bertujuan untuk menggerakkan sekelompok orang (*massa*). *Frame* tindakan kolektif diciptakan sebagai bagian dari upaya untuk menegosiasikan pandangan dan sikap terhadap suatu persoalan yang menurut para inisiator gerakan ini perlu diubah. Termasuk di dalam negosiasi ini adalah (1) menentukan apa atau siapa yang mesti disalahkan, (2) kemudian menyampaikan alternatif tindakan yang mesti diambil

⁶⁰ A Sumarwan Sj, “Memahami Framing Gerakan Sosial”, Universitas Sanata Dharma, Jurnal BASIS Nomor 01–02, Tahun Ke-67, 2018, hlm. 25.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

dan akhirnya (3) mendorong orang banyak agar bergerak bersama mewujudkan perubahan. Benford & Snow menyebut tiga hal tersebut sebagai peran utama framing, yang mereka bedakan sebagai *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing*.⁶³

Terkait tugas utama *framing* ini, para insiator gerakan berperan penting dalam “mobilisasi konsensus” dan “mobilisasi aksi” Mobilisasi konsensus mendorong terjadinya kesepakatan tentang suatu persoalan, sementara mobilisasi aksi mendorong terjadinya gerakan. *Diagnostic framing* berperan mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah tersebut. Menunjukkan masalah secara jelas dan terang-benderang adalah langkah pertama. *Frame* yang berhasil biasanya menampilkan persoalan rumit dengan cara sederhana. Setelah masalah ditentukan, bagian berikutnya dari *diagnostic framing* adalah mengidentifikasi sumber masalah atau menunjuk siapa atau apa yang dipersalahkan atau harus bertanggung jawab.⁶⁴

Setelah masalah ditentukan, tugas berikutnya dari *framing* adalah peran prognosis (*framing prognostic*), yaitu menawarkan kemungkinan solusi atas masalah atau rencana untuk menghadapi masalah, serta strategi untuk melaksanakannya. Agar dapat menggerakkan orang, *framing* juga punya peran motivasional (*motivational framing*), yaitu menyediakan alasan untuk terlibat

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

dalam gerakan bersama untuk memperbaiki situasi, termasuk di dalamnya menciptakan kosa kata dan jargon yang cocok untuk memotivasi.⁶⁵

Setelah melalui tiga tahap tersebut, tahap selanjutnya dari proses pbingkaian yang dijelaskan oleh Snow, Rechrord, Worden, dan Benford adalah *frame alignment* (penyejajaran bingkai). Dalam prosesnya, penyejajaran bingkai bekerja pada empat elemen dasar, yaitu penjembatanan bingkai (*frame bridging*), penguatan bingkai (*frame amplification*), perluasan bingkai (*frame extension*), dan transformasi bingkai (*frame transformation*).⁶⁶ Penjembatanan bingkai (*frame bridging*) dijelaskan oleh Snow dan koleganya yaitu mengacu pada proses menghubungkan antara dua atau lebih *frame* ideologis yang serupa namun tidak berhubungan secara struktural. *Frame* ideologis yang dimaksud dalam proses ini merujuk pada penjelasan Erving Goffman yaitu sebagai "skema interpretasi" yang merupakan pemahaman dan pemberian label terhadap suatu peristiwa. Secara sederhananya proses penjembatanan bingkai merupakan usaha yang dilakukan gerakan untuk mengenalkan hal yang diusung dan disuarakannya ke publik.⁶⁷

Penguatan bingkai (*frame amplification*) secara sederhana bingkai merupakan usaha dari gerakan untuk memperjelas kembali permasalahan atau ideologi yang diperjuangkan karena seringkali permasalahan atau ideologi yang diperjuangkan tertutup oleh ketidakpedulian dalam masyarakat. Sehingga

⁶⁵*Ibid*, hlm. 27.

⁶⁶ Muhamad Luthfi, "GNPF MUI: Strategi Pbingkaian Dan Keberhasilan Gerakan Populis Islam Indonesia", *Asketik* Vol. 3 No. 1 Juli 2019, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 38.

⁶⁷ Novrizaldi, "Strategi Pbingkaian (Framing) Koalisi Pejalan Kaki (Kopk) Jakarta: Perspektif Gerakan Sosial", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, hlm. 61.

diperlukan adanya amplifikasi ini untuk memperjelas dan menguatkan bingkai yang telah disuarakan sebelumnya. Proses amplifikasi bingkai ini dibagi menjadi dua jenis yaitu amplifikasi nilai (*value amplification*) dan amplifikasi kepercayaan (*belief amplification*).⁶⁸ Amplifikasi nilai mengacu pada proses identifikasi (penilaian), idealisasi (pengidealan) dan elevasi (pengangkatan) dari satu atau lebih nilai yang dianggap dapat menjadi basis bagi calon pengikut tetapi tidak mendasari aksi kolektif. Munculnya proses amplifikasi nilai dalam konteks ini adalah untuk menguatkan jangkauan bingkai yang telah dibuat dengan mengangkat beberapa isu yang relevan dan cukup kuat untuk menjangkau “kelompok sentimen yang belum termobilisasi” karena bingkai yang telah dibuat sebelumnya tidak begitu mendasar bagi calon pengikut gerakan.⁶⁹

Snow memberi pengertian penguatan keyakinan (*belief amplification*) sebagai seperangkat ideasional yang dipromosikan kepada publik untuk mendukung aktor mengejar nilai-nilai yang diinginkan. Situasi *emergency* merupakan penguatan keyakinan berguna meningkatkan kadar keseriusan masalah yang sedang di persoalkan. Snow menjelaskan bahwa penguatan keyakinan bekerja pada keyakinan terhadap derajat keseriusan masalah, sebab-akibat, stereotipe lawan atau target, kemungkinan adanya perubahan, dan signifikansi mengambil bagian dalam aksi kolektif.⁷⁰

Ketika suatu gerakan telah melakukan amplifikasi nilai dan keyakinan, mungkin saja tidak mengakar pada kelompok sentimen dan kelompok-kelompok

⁶⁸*Ibid*, hlm. 68.

⁶⁹*Ibid*, hlm.70.

⁷⁰ Muhamad Luthfi, *Op.Cit*, hlm. 41.

pengikut yang ada, atau mungkin tampak sedikit ada kaitannya dengan situasi kehidupan dan kepentingan dari pengikut potensial. Jika hal itu terjadi, maka organisasi gerakan sosial harus memperluas batasan-batasan dari bingkai utamanya sehingga dapat mencakup kepentingan atau sudut pandang yang bersifat tidak terduga terhadap tujuan utamanya namun sangat penting bagi para pengikut potensial.⁷¹ Perluasan bingkai dapat dipahami sebagai upaya memperluas cakupan sudut pandang sebuah masalah – bersifat insidental bagi tujuan utama tetapi sangat penting bagi para pengikut potensial. Dalam kerangka penyejajaran bingkai, maka perluasan bingkai juga merupakan unsur penting dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk secara sukarela berpartisipasi dalam sebuah gerakan.⁷²

Apabila keyakinan dan nilai-nilai yang diusung oleh gerakan sosial tidak beresonansi dan bahkan berlawanan dengan kenyataan yang ada, maka menurut Goffman nilai baru harus ditanam dan dipelihara; pemahaman lama harus disingkirkan; keyakinan-keyakinan yang keliru atau "*misframing*" harus dibingkai ulang. Transformasi tersebut menurut Goffman disebut sebagai kegiatan mendefinisikan ulang "kunci", peristiwa dan biografi yang telah memiliki makna dari sudut pandang kerangka utama ke dalam kerangka lain yang akan "dilihat oleh para peserta menjadi sesuatu". Jadi yang diperlukan adalah "perubahan sistematis" yang secara keseluruhan menyusun kembali apa adanya bagi peserta yang sedang berlangsung.⁷³

⁷¹ Novrizaldi, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

⁷² Muhamad Luthfi, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁷³ Novrizaldi, *Op.Cit*, hlm. 34.

1.5.2 Konsep Budaya Politik

Lahirnya kebudayaan itu sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama.⁷⁴ Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.⁷⁵ Secara umum bagian-bagian budaya politik terbagi atas tiga:⁷⁶

1. Budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, dan pasif)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi)
3. Budaya politik partisipatif (aktif atau cekatan)⁷⁷

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁷⁸

- a. Budaya Politik parokial (*parochial political culture*) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi individu tersebut terhadap dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak

⁷⁴ Adi Sucipto, "Budaya Politik Lokal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014", FISIPOL Universitas Kutai Kartanegara, Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM, Volume 4 No 1 2015, hlm. 33.

⁷⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 352-353.

⁷⁶ Elly M. Setiadi, *Op. Cit*, hlm. 100.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 100-101.

⁷⁸ Adi Sucipto, *Op. Cit*, hlm. 34.

memiliki perhatian sama sekali terhadap dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini memiliki perhatian sama sekali terhadap dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat *provincial*. Karena wilayah yang terbatas seringkali pelaku politik memainkan peranannya seiring dengan diferensiasi, maka tidak terdapat peranan politik yang bersikap khas dan berdiri sendiri. Ciri-ciri Masyarakat (orang) dengan budaya politik Parokial, antara lain: apatis, pengetahuan politik rendah, kesadaran dalam berpolitik rendah, tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik.

- b. Budaya Politik kaula (*subyek political culture*) yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif, anggota masyarakat mempunyai minat perhatian, mungkin juga kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam keseluruhan terutama pada aspek outputnya. Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan oleh karena itu menyerah saja pada kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan. Ciri-ciri Masyarakat (orang) dengan budaya politik kaula, antara lain: memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup, partisipasi politik minim, kesadaran dalam berpolitik rendah.

- c. Budaya Politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dalam budaya ini memiliki sikap yang kritis untuk memberi penilaian terhadap sistem politik dan hampir pada semua aspek kekuasaan. Ciri-ciri masyarakat dengan budaya politik partisipan, antara lain: pengetahuan tentang politik tinggi, kesadaran dalam berpolitik tinggi, partisipasi dalam berpolitik aktif, kontrol Politik aktif.⁷⁹
- d. Budaya Politik campuran (*mixed political cultures*) yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni yang diuraikan di atas.⁸⁰

Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang.⁸¹

Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu:⁸²

⁷⁹*Ibid*, hlm. 34-45.

⁸⁰A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 257.

⁸¹Galuh Septianingrum, "Budaya Politik Dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Suwatu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Di Kabupaten Pati Tahun 2012", Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

⁸²*Ibid*, hlm. 25

1. Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara.
2. Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
3. Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

1.5.3 Konsep Perilaku Politik

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat dicermati akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan dengan proses politik.⁸³

⁸³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Graindo, 2010), hlm. 20.

Menurut Sitepu, perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).⁸⁴

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.⁸⁵

Asep dalam penelitiannya yang berjudul “Memahami Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2004” menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, diantaranya yaitu:

1. Perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis masa lalu. Hal ini disebabkan budaya politik tidak

⁸⁴ Rizki Rahman Harahap, “*Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014)*”, Jom FISIP Volume 3 No.2 Oktober 2016, Universitas Riau, hlm. 4.

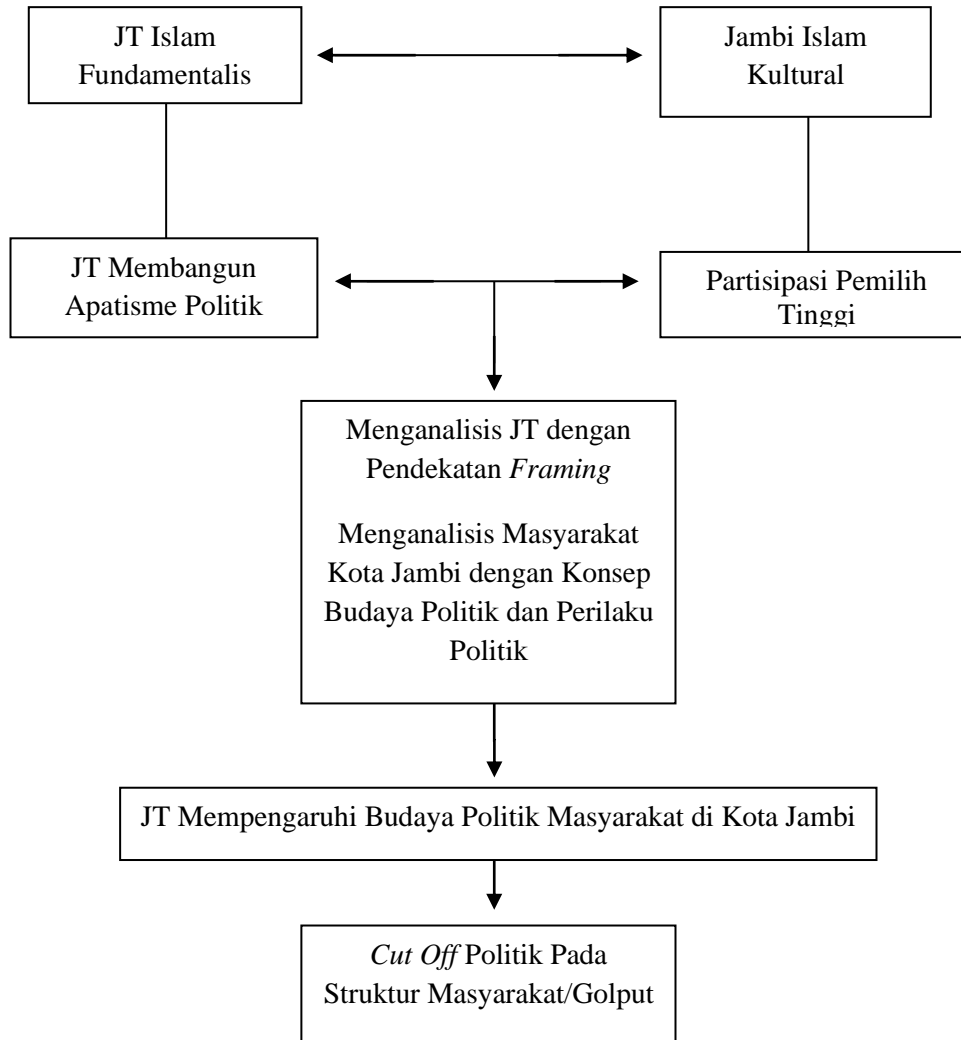
⁸⁵*Ibid.*

merupakan kenyataan yang statis melainkan berubah dan berkembang sepanjang masa.

2. Faktor kondisi geografis memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat sebagai kawasan geostrategis, walaupun kemajemukan budaya Indonesia merupakan hal yang rawan bagi terciptanya disintegrasi. Kondisi ini mempengaruhi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat, kesenjangan pemerataan bangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, teknologi mempengaruhi proses sosialisasi politik.
3. dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.
4. Pendidikan dan komunikasi juga mempengaruhi perilaku politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya. Komunikasi yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam kegiatan politiknya.
5. Faktor kepribadian mempengaruhi perilaku politik.⁸⁶

⁸⁶*Ibid.*

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian (*research approach*) merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah: dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.⁸⁷ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁸⁸ Atau metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Jambi dikarenakan lokasi tersebut adalah pusat pergerakan Jamaah Tabligh di Provinsi Jambi dibuktikan dengan keberadaan Markas JT, yaitu Masjid Al-Azhar, Hayam Wuruk, tepatnya di Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Peneliti telah menentukan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai: Bagaimana perkembangan Gerakan Jamaah Tabligh dan bagaimana implikasinya terhadap budaya politik masyarakat di Kota Jambi.

⁸⁷Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 3.

⁸⁸*Ibid*, hlm .4.

1.7.4 Sumber data

Beragam sumber data (*multiple sources of data*): para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari beragam sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan informasi audio visual ketimbang hanya bertumpu pada satu sumber data saja. Kemudian, peneliti *me-review* semua data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data.⁸⁹

Adapun beragam sumber data pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui observasi *open-ended* di lapangan, wawancara *face-to-face* dengan informan, data dari dokumen publik seperti artikel, jurnal penelitian terdahulu, literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan adalah metode yang dipakai oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapakah yang akan dijadikan sumber data (informan). Penentuan informan dilakukan berdasarkan ketertibatan(keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimintai informasinya berdasarkan keterlibatannya dengan objek penelitian.⁹⁰ Teknik yang digunakan ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah

⁸⁹*Ibid*, hlm. 248.

⁹⁰ Pahrudin HM, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi*, (Universitas Jambi : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017), hlm. 15

mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*).

Adapun informan kunci pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1.7.5 Informan utama

No	Nama	Alasan
1	Sampit, S.P.	Ahli Syura Provinsi JT Masjid Al-Azhar
2	Asmuni Lizar, AMd.	<i>Faisalat</i> Provinsi JT Masjid Al-Jihad
3	Syamsuardi, S.E.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif di JT 2. Mantan anggota DPRD Kota Jambi periode 2004-2009 (dari PAN) 3. Tiga kali mencalonkan diri di Pileg Provinsi tahun 2009,2014,2019 (dari PKS)
4	Jefri Hendrik, S.Pt., ME.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif di JT 2. Mantan Wakil Ketua satu DPD Partai Demokrat Jambi tahun 2004 3. Caleg DPD RI tahun 2014 4. Mantan Sekretaris DPW PAN Kota Jambi tahun 2015 5. Mantan Direktur Zulkifli Nuridin (ZN) Center 6. Mantan Staf Ratu ZN di DPR RI 7. Mantan Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi 2005-2007 8. Mantan Bendahara Umum Pergerakan Indonesia Jambi 2002-2003 9. Pengurus ICMI Orwil Jambi
5	Maindri Saputra, S.E.	Penanggung jawab Jamaah India Pakistan Bangladesh <i>halaqah</i> Alam Barajo JT Masjid Al-Azhar
6	Andi Bin Zarkasih	Penanggung jawab Jamaah Tunarungu Provinsi JT Masjid Al-Azhar
7	Boby Indra Gunawan, S.IP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantan Anggota JT Jambi 2. Anggota Ormas GARBI Jambi

Selain menentukan informan utama, peneliti juga menentukan informan tambahan sebagai berikut:

Tabel 1.7.5 Informan tambahan

No	Nama	Alasan
1	Tarmizi	Anggota JT
2	Dendi Prayanda	Anggota JT
3	M. Ilham Wahyudi Purnomo	Anggota JT
4	Ahmad Asyiri	Anggota JT
5	Ismail Naswin	Anggota JT
6	Edo Kurniawan	Anggota JT
7	Hadi Wiyono	Anggota JT
8	Hasan Ali	Anggota JT
9	Zamhari	Anggota JT
10	Dimiyati Abdullah	Anggota JT
11	Muhammad Arsyad	Anggota JT
12	Muhammad Zaini	Anggota JT
13	Muhammad Mas'ud	Anggota JT
14	Muhammad Adi Candra	Anggota JT

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi kualitatif. Observasi kualitatif (*qualitative observation*) adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti akan merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur aktivitas-

aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.⁹¹

B. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif (*qualitative interview*), peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan ataupun opini dari para partisipan.⁹² Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan lebih terbuka dan pembicaraan tidak kaku.

C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses *me-review* kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang

⁹¹Creswell, *Op.Cit*, hlm. 254.

⁹²*Ibid*, hlm. 254.

telah ditemukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat misalnya, buku harian, diari, surat, *email*).⁹³

1.7.7. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, peneliti perlu memisahkan data, yaitu suatu proses yang memfokuskan pada sebagian data dan bagian-lainnya.⁹⁴ Berikut langkah-langkah analisis data kualitatif:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi;
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan;
- 3) Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam penyampaian hasil analisis;
- 4) Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data.⁹⁵

⁹³*Ibid*, hlm. 255.

⁹⁴*Ibid*, hlm. 261.

⁹⁵*Ibid*, hlm.264-267.

1.7.8 Keabsahan Data

Validitas kualitatif (*qualitative validity*) merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.⁹⁶ Peneliti perlu menjelaskan strategi-strategi validitas (*validity strategies*) ke dalam proposalnya. Berikut strategi validitas yang digunakan pada penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber Data, yakni mentrianggulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. Hal ini tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasinya. Sebaliknya, yang harus dibawa peneliti adalah bagian dari hasil penelitian yang sudah dipoles, seperti tema, analisis kasus, *grounded theory*, deskripsi kebudayaan, dan sejenisnya.

⁹⁶*Ibid*, hlm.269.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan pada skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam penulisan:

Bab I: Pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Deskripsi Objek Penelitian berisikan:

- A. Kondisi Geografis Kota Jambi
- B. Kondisi Demografis Kota Jambi
- C. Pemerintah Kota Jambi
- D. Sejarah Jamaah Tabligh
- E. Dualisme Jamaah Tabligh
- F. Ajaran Jamaah Tabligh
- G. Struktur dan Keanggotaan Jamaah Tabligh
- H. Sumber Dana Jamaah Tabligh
- I. Jaringan Jamaah Tabligh
- J. Kegiatan dan Pola Sosialisasi Jamaah Tabligh

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan bab yang berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil penelitian.

Bab IV: Penutup bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.